**PENGAWASAN IZIN SURAT HAK PENEMPATAN (SHP) KIOS PASAR
TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR RUMBAI KOTA PEKNBARU)**

Oleh

Pitri Pebrianti (1401111852)

febriantif4@gmail.com

Pembimbing : Abdul Sadad

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The supervision of the placement rights letter is to assist in the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2014 which contains that every trader must have a Right of Placement. There are still many traders who do not have these Placement Rights letters in traditional markets. By not making a Placement Rights Letter this is one of the factors that decreases market retribution. Traders still do not understand this Placement Rights Letter because the merchant feels that the SHP is just a stall rental permit. Supervision is carried out every time there are reports or data of traders entering to make stall rights letters which are included in Pekanbaru Mayor Regulation Number 30 of 2016. Research conducted using qualitative research methods. This study uses the concept of supervision by Manullang, namely: Determining a Measuring Instrument (Standard), Conducting Assessment, Conducting Corrective Action. This research data collection techniques carried out were observation, interviews, documentation and literature study using descriptive analysis techniques. Supervision of the Placement Rights Letter of traditional markets in Pekanbaru, especially the tassel market, is not in accordance with the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 9 of 2014 and the Regulation of the Mayor of Pekanbaru Number 30 of 2016. The supervision of the Placement Rights Letter was supervised by the Disperindag by the market and assisted by the UPTD. The market sector assigns tasks to the UPTD if there are problems in the market that have not been resolved. Problems arising, especially the tassel market, among others, are many traders who do not have a Placement Rights Letter, traders are late paying kiosk rental fees, traders complain lonely buyers who come to the tassel market to shop and less safe and comfortable tassel market conditions for traders and existing buyers. The factors that influence the Supervision of Placement Rights Permit Traditional Market stall (Case Study of market Rumbai Pekanbaru City) are human resources and merchant participation. Human resources will influence supervision so that merchant participation is expected. So that payments will be made on time.

Keywords: Supervision, Letter Of Placement Rights Stall, Traditional Market

Latar Belakang

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru menjadi pusat investasi, perdagangan, pendidikan yang tentunya akan mendatangkan banyak orang, baik lokal maupun mancanegara yang sekedar berwisata, berbelanja, maupun berinvestasi, sehingga hal ini memerlukan perhatian yang serius. Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah pemerintahan yang melaksanakan pembangunan dan memiliki tujuan yang harus dicapai melalui pembangunan disemua sektor, termasuk sektor pembangunan pasar tradisional.

Pembangunan di Kota Pekanbaru sangat pesat, mengingat Visi Kota Pekanbaru Tahun 2021 sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2001, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan taqwa. Maka berangkat dari visi tersebut hampir disemua daerah dilakukan pembangunan dan pembenahan infrastruktur dari berbagai sektor, termasuk pada sektor pasar. Pembangunan pasar yang dilakukan di kota Pekanbaru merupakan pembanguan yang digunakan untuk mewujudkan visi misi kota Pekanbaru. Misi kota pekanbaru yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Swalayan mendefenisikan pasar rakyat merupakan tempat usaha yang di tata , dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan / atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro,kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Tempat usahanya dapat berbentuk toko, kios, los dan tenda kaki lima yang menyediakan barang-barag konsumsi sehari-hari masyarakat. Pemanfaat pasar tradisional biasanya adalah pedagang kecil, menengah dan, koperasi. Proses tawar menawar antara konsumen dan produsen merupakan relasi yang khas pada pasar tradisional. Pasar tradisional juga mampu membuat para pedagang, untuk mengurangi jumlah pengangguran serta merupakan tempat pertukaran uang, barang dan jasa bagi masyarakat lokal.

Kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu sama lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-lagit yang dipergunakan untuk berjualan. Penataan kios tidak lepas dari adanya suatu kontrak atau perjanjian antara setiap pedagang yang menempati kios atau los dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kontrak penyewaan kios telah ditentukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang kemudian akan disetujui oleh para pihak pedagang. Dari penyewaan kios pedagang harus memiliki identitas penyewaan yaitu surat hak penempatan

(SHP) kios. Surat hak penempatan kios adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan los di pasar rakyat atau tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pengawasan izin surat hak penempatan kios dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melakukan mendataan penyawaan kios agar tidak ada kecurangan yang terjadi. Melainkan masih banyak pedagang yang tidak memiliki izin surat hak penempatan kios di pasar-pasar tradisional. Pengawasan Surat Hak Penempatan (SHP) kios diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian diberikan ke bidang pasar. Di dalam Perwako Nomor 30 tahun 2016 pasal 15 ayat (1) bagian c berbunyi: “ atas dasar permohonan tersebut, Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru melakukan penelitian administrasi dan pengecekan lapangan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya Surat Permohonan yang hasilnya di tuangkan dalam berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Form-2 lampiran 1”.

Surat hak penempatan kios poin kedua yang berbunyi bahwa barang-barang dagangan harus ditempatkan di dalam ruang kios/los dan penempatan tidak boleh melebihi luas ruang kios/los sebagaimana disebutkan dalam surat hak penempatan ini. Nyatanya masih banyak pedagang yang menempatkan dagangannya diluar area kios dan sampai di bawah area tangga. Ini merupakan salah satu membuat pembeli kurang nyaman. Masih banyak pedagang yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh dinas perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru. Pedagang semena-mena dalam menata kelola dagangan mereka, dan meletakkan dagangan yang melebihi kapasitas ruangan dan memakai area jalan yang dilalui pembeli.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan Kios (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu Administrasi dan untuk membahas mengenai Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Izin Hak Penempatan Kios (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah wawasan mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan pengawasan tentang penempatan kios serta menganalisis permasalahan yang terjadi karena ketidak sesuaian antara harapan dengan kenyataan mengenai surat hak penempatan kios pasar

- tradisional (studi kasus pasar rumbai Kota Pekanbaru)
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam penelitian mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah surat hak penempatan kios pasar tradisional (studi kasus pasar rumbai Kota Pekanbaru)

Konsep Teori

1. Pengawasan

Menurut Runapanjodo (2002:6) pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan, atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana personalia, yang dirumuskan sebagai dasar analisa dari tujuan organisasi yang fundamental.

Menurut Winardi (2006: 397) pengawasan terdiri dari pada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni:

- a. Mengukur hasil pekerjaan.
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apa bila ada perbedaan).
- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Menurut Noor (2015:283) Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh

administrasi, manajemen dengan menggunakan dua macam teknik yakni:

- a. Pengawasan langsung
Ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.
- b. Pengawasan tidak langsung
Yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Menurut Manullang (2008: 178) cara-cara mengawasi supaya pengawasan yang dilakukan seorang atasan efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta di tangan pemimpin yang bersangkutan. Guna maksud pengawasan seperti ini, ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta-fakta, yaitu:

- a. Peninjauan pribadi.
- b. Interview atau lisan.
- c. Laporan tertulis.
- d. Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa.

Menurut Manullang (2015: 184) proses pengawasan dimana pun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut:

- a. menetapkan alat pengukur (standar).
- b. Mengadakan penilaian.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di temukan (Sugiyono, 2006:11). Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha

menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil Lokasi Penelitian Jl. Teratai No. 81 dan Jl. Sekolah/ khayangan di Pekanbaru. Pasar tradisional yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Lokasi ini didasarkan pada pertimbangan karena pengawasan izin surat hak penempatan kios pasar tradisional (studi kasus pasar rumbai Kota Pekanbaru) belum berjalan maksimal. Alasan pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki data dan sampel yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

3. Informan Penelitian

Dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut **Sugiyono (2013:218)** metode *purposive sampling* adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan-informan pelengkap lain yang mengetahui informasi terkait pengawasan izin surat hak penempatan kios pasar tradisional (studi kasus pasar rumbai Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut:

1. Informen Penelitian yaitu :
 - a. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru.
 - b. Kasi Retribusi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru.
 - c. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar Rumbai di Kota Pekanbaru.

- d. Pedagang pasar yang menyewa kios pasar rumbai di Kota Pekanbaru.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder, terkait dengan tujuan penelitian yakni data yang terkait dengan terkait pengawasan izin surat hak penempatan kios pasar tradisional (studi kasus pasar rumbai Kota Pekanbaru) meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung, yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian mengenai Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru) yaitu wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Kasi Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Kepala UPTD Pasar Rumbai Kota Pekanbaru, pedagang yang berada di area Pasar Rumbai.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau lembaga terkait yaitu mengenai:

- a. Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- b. Data pasar tradisional yang ada di Pekanbaru

- c. Data jumlah kios, los, kaki lima yang ada di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru
- d. Data jumlah izin surat hak penempatan kios di pasar tradisional Kota Pekanbaru
- e. Data perundang-undangan dan data lain yang mendukung penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, meliputi :

- a. Observasi (pengamatan)
Yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti guna untuk mengetahui sejauh mana Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru).
- b. Interview (wawancara)
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan (**Sangadji, 2010:48**). Penulis mengadakan wawancara mendalam terhadap informan untuk memperoleh data mengenai Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)..
- c. Studi kepustakaan
Yaitu penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur berupa buku, artikel di jurnal dan makalah seminar (**Afrizal, 2016:122**)
- d. Dokumentasi
Yaitu dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada

hubungannya dengan penelitian yaitu berupa file, foto dan sebagainya

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintema menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014:89).

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Analisis penulis dari data yang diperoleh dilapangan masih banyak pedagang yang tidak memiliki Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios untuk pasar tradisional. Kurangnya kepedulian pedagang dalam merawat keadaan kios di pasar rumbai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)

Dalam proses manajemen pengawasan merupakan fungsi terakhir. Dimana pada tahap pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pemotivasian, dan pengawasan. Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional Kota Pekanbaru yang berfokus pada Pasar Rumbai, menurut teori yang

dikemukakan oleh Manullang, yang mengatakan bahwa suatu kegiatan pengawasan melalui tiga tahap, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Menentukan Standar

Standar ini meliputi standar organisasional dan pelaksanaan teknis dilapangan yang mana segala bentuk pelaksanaan pengawasan dilakukan dilapangan diatur sedemikian rupa oleh standar-standar operasionalnya. Terdapat tiga sub indikator untuk melakukan pengawasan. Adapun standar pertama yang ditetapkan dalam melaksanakan pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional ini adalah pembagian tugas yang jelas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas diharapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat mengawasi Izin Surat Hak Penempatan (SHP) kios Pasar Tradisional secara maksimal. Dalam hal ini yang bertugas mengawasi ke lapangan adalah kasi retribusi dan UPTD pasar, setelah pedagang memasukan surat permohonan ke UPTD untuk membuat izin penyewaan kios, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bidang pasar melakukan pemeriksaan di lapangan dan melakukan penilaian apakah pedagang tersebut sudah sesuai standar untuk mendapatkan izin surat hak penempatan (shp) kios.

Sub indikator kedua yaitu Standar waktu yang merupakan penentuan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional terhadap pasar rumbai. Dari hasil penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan tidak menentu dan belum ada

pengawasan secara berkala terkait Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional. Pengawasan dilakukan berdasarkan adanya surat permohonan yang masuk dari pedagang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian bidang pasar Kota Pekanbaru yang ingin membuat surat hak penempatan kios pasar tradisional khususnya pasar rumbai..

Yang ketiga yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) salah satu alat yang biasa digunakan oleh suatu instansi untuk dijadikan standar pengukuran. Pengawasan yang efektif terjadi apabila standar pelaksanaan tersusun dengan jelas. Sebagaimana penetapan standar dalam pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru). Standar Operasional Prosedur yang dilaksanakan untuk mengawasi Surat Hak Penempatan (SHP) Kios yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016.

2) Mengadakan Penilaian

Dari analisis hasil mengadakan penilaian kita dapat menilai sejauh mana tingkat efektivitas dari penilaian pengawasan yang telah dilakukan, melalui hasil analisis kita dapat mengetahui dimana saja letak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan yang telah dilakukan dan kita dapat merancang kembali perencanaan pengawasan yang sedemikian rupa berdasarkan perbaikan-perbaikan dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Surat Hak Penempatan (SHP) Kios yang berlaku di Kota Pekanbaru sudah mulai berlaku sejak tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, mulai berlakunya peraturan tersebut maka mulai pula Surat Hak Penempatan (SHP) Kios menjadi kewajiban yang mutlak dimiliki oleh setiap pedagang di

pasar-pasar tradisional modern yang ada di Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya sejak diberlakukannya perwako nomor 30 tahun 2016 tersebut hingga akhir 2018 ini masih terdapat pedagang di pasar tradisional khususnya pasar Rumbai yang disegel bahkan ditutup karena tidak memiliki surat hak penempatan (shp) kios. Jadi dapat diketahui berdasarkan penelitian di lapangan bahwa mengadakan penilaian dengan kenyataan di lapangan belum optimal.

3) Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan yang dimaksud adalah tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Tindakan perbaikan tersebut dapat berupa teguran dan peringatan terhadap penyimpangan. Teguran dan peringatan merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan saat terjadinya penyimpangan terhadap peraturan yang telah dibuat. Salah satu bentuk tindakan perbaikan terhadap pengawasan dapat berupa pemberian sanksi dan teguran.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan ke lapangan jika mendapati suatu pedagang tanpa izin lengkap langkah yang pertama diambil yaitu memberikan Surat Teguran pertama pada pedagang, kemudian setelah dilakukannya surat teguran tersebut kemudian pedagang diminta untuk mengurus surat menyurat mengenai perizinan yang harus dimiliki yaitu tentunya Surat Hak Penempatan (SHP) Kios tersebut.

Pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memberikan kesempatan kepada pedagang tersebut hingga dapat mengurus perizinan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah Kota Pekanbaru. Jika tidak, maka Surat Peringatan kedua pun di berikan kepada

pedagang yang kemudian berujung pada penyegelan. Surat peringatan kedua tersebut disertai dengan pemanggilan pedagang untuk diberikan pemahaman atau sosialisasi akan perlunya Surat Hak Penempatan (SHP) Kios tersebut. Pemanggilan ini tentunya ditujukan agar pelaku usaha mampu untuk mengurus Izin Surat Hak Penempatan (SHP) kios tersebut.

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional Kota Pekanbaru khususnya Pasar Rumbai yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru selain dari teguran dan surat peringatan ialah sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa pencabutan Surat Hak Penempatan Kios bahkan penutupan kios secara paksa oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

B. Faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan Kios Pasaar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru)

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, adapun faktor-faktor yang menghambat dalam Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru) yang menjadi salah satu hambatan adalah Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (shp) Kios dapat dilaksanakan dengan optimal dan apabila didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai.

Dengan SDM yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan pengawasan yang bersinergi tentunya bagi instansi terkait,

dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah jumlah petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap izin surat hak penempatan (shp) kios yang harus dimiliki oleh seluruh pedagang yang menyewa kios-kios yang ada di pasar tradisional Kota Pekanbaru. Dalam hal ini petugas lapangan pada seksi retribusi dan uptd dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dinilai kurang, mengingat bahwa jumlah pedagang yang menyewa kios di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru sangat banyak dan tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Partisipasi Pedagang

Partisipasi pedagang merupakan faktor yang yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan. Dalam hal ini pedagang seharusnya ikut berpartisipasi dalam menjalankan aturan yang ada di Kota Pekanbaru, dimana pedagang yang menyewa kios di pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru ini wajib memiliki Surat Hak Penempatan karena sesuai dengan PerDA No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Sawalayan dan Perwako No 30 Tahun 2016.

Pedagang perlu memiliki kesadaran dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga perlu memahami bagaimana dampak yang terjadi jika pedagang tidak memiliki Surat Hak Penempatan (SHP). Meskipun pengawasan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memiliki kecakapan dan keahlian dibidangnya, namun jika kesadaran pedagang yang kurang untuk mematuhi sebuah peraturan maka pengawasan tidak akan berjalan efektif. Begitu juga dalam pelaksanaan Pengawasan Izin Surat Hak

Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar umbai Kota Pekanbaru). Peneliti menemukan masih ada beberapa pedagang yang tidak memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) Kios khususnya pasar rumbai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru) sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai peran penting sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan Kios Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rumbai Kota Pekanbaru). Namun pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Pengawasan sudah dilaksanakan agar terwujudnya tujuan yaitu semua pedagang yang menyewa kios pasar tradisional sudah memiliki izin dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Tetapi nyata masih banyak pedagang yang tidak mau mengurus atau membuat izin surat hak penempatan kios pasar tradisional (studi kasus pasar rumbai kota pekanbaru). Standar yang di gunakan yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 belum berjalan dengan optimal. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah berusaha menjalankan pengawasan semaksimal mungkin tetapi masih ada kekurangan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengawasan Izin Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan Kios Pasar Tradisional

(Studi kasus pasar rumbai Kota Pekanbaru) adalah kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan izin surat hak penempatan kios pasar tradisional (studi kasus pasar rumbai kota pekanbaru). Kurangnya kesadaran pedagang dalam pembuatan izin surat hak penempatan (shp) kios.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan Kios Pasar Tradisional (Studi kasus pasar rumbai Kota Pekanbaru), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan lagi terhadap Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan Kios Pasar Tradisional Kota Pekanbaru khususnya Pasar rumbai. Jika pengawasan dilakukan dengan baik maka izin surat hak penempatan kios tidak akan ada pedagang yang tidak membuat, tidak ada yang melanggar peraturan surat hak penempatan yang sudah ditentukan, sehingga bisa terwujud pengawasan yang sudah ditentukan secara optimal dan pasar tradisional bisa tambah ramai dan pedagang banyak yang menyewakan kios-kios yang ada di pasar tradisional.
2. Adapaun saran terhadap faktor-faktor yang menghambat dalam Pengawasan Izin Surat Hak Penempatan Kios Pasar Tradisional (Studi kasus pasar rumbai Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut ini:
 - a. Pemerintah diharapkan dapat lebih ketat lagi dalam melihat pengawasan pasar tradisional.. Agar pengawasan izin surat hak

penempatan kios dapat berjalan dengan baik.

- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus melakukan penambahan sumber daya manusia, sehingga celanya kekosongan yang terjadi di kantor dapat terisi agar tidak terjadinya tumpang tindih tanggung jawab.
- c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus lebih ketat lagi terhadap updt yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Seperti memberikan surat teguran atau sanksi jika updt yang tidak bekerja dengan optimal.
- d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus memberikan sanksi yang kuat seperti membayar denda dengan nominal yang tinggi kepada pedagang yang tidak memiliki atau membuat izin. Agar pedagang berusaha ingin membuat izin penyewaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan.
- Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Staka Pelajar.

Kotler, Philip. dkk. 2000. *Manajemen Pemasaran Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitable*. Jakarta: Gramedia Pusat Utama.

Lamarto, Yohanes. 2000. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga

Mulyana, Deddy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Manullang, M. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

-----, 2008. . *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Noor, Juliansyah. 2015. *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Prawirosentono, Suyadi. 2009. *Manajemen Operasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ranupandojo, Heldjrachman. dkk. 2002. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen Pendekatan Aplikasi Bidang Pertanian*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Simamora, Bilson. 2003. *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitabel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Solihin, Ismail. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tisnawati, Ernie Sule. dkk. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Winardi. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Alumni.

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Jurnal

Tambunan, Beriman. 2017. "Revitalisasi Pasar Tradisional Pada Pasar Lima Puluh Kota Pekanbaru". *Skripsi. FISIP, Administrasi Publik. Universitas Riau*.

Birauti, Katya Nabila Saka. 2016. "Pelaksanaan Kontrak Hak Penempatan Kios Antara Pedagang

Dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Surakarta Pasca Kebakaran Pasar
Klewer”. *Skripsi*. FH. Un